

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terhitung sejak memproklamkan kemerdekaan sebagai sebuah negara modern dengan konsep negara bangsa (*nation-state*), Indonesia menjadikan demokrasi sebagai sistem politik, dalam perjalanannya, Indonesia sudah 12 kali menyelenggarakan pemilu sebagai pesta demokrasi (Munjani, 2012:43). Hasil dari beberapa pemilu tersebut bisa dijadikan sebagai objek kajian untuk melihat dinamika partisipasi politik perempuan. Indikatornya yaitu perkembangan tingkat keterwakilan suara perempuan, baik di ranah internal partai, legislatif, maupun eksekutif. Sejauh mana tingkat partisipasi politik sudah diperankan oleh perempuan di Indonesia.

Berkaitan dengan negara Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki sebuah aturan yang tertuang di Undang-undang Negara. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan dibuktikan diterbitkannya berbagai pranata hukum mulai dari ratifikasi konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi Perserikatan bangsa-bangsa tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, kemudian tercetusnya peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

Perbandingan Jumlah penduduk perempuan menurut sensus BPS pada 2020 sebanyak 133,54 juta orang dan laki-laki 136,66 juta orang. Sedangkan keterwakilan laki-laki di legislatif mencapai 82,51 persen dan perempuan hanya 21,09 persen. Perempuan sebagai warga negara memerlukan perjuangan yang ekstra untuk dapat masuk ke dalam politik. Pasalnya, perempuan memiliki ketertinggalan dari laki-laki sejak lama, akibat budaya patriarki yang ada. Maka tak pelak *affirmative action* menjadi sebuah gerbang awal bagi perempuan untuk berkontestasi di arena politik (Pertiwi, 2019:271). Begitu pula dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan

Hera Widaningsih, 2022

PERAN ORGANISASI EKSTRA KAMPUS DALAM MENINGKATKAN LITERASI POLITIK PEREMPUAN
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu), terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan keterwakilan 30% untuk perempuan dalam Pasal 8 ayat 1 d,

Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan; (d) menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Undang-undang tersebut dianggap membawa perubahan positif, pencantuman angka 30% bagi kaum perempuan sebagai calon anggota legislative dalam setiap parpol seperti yang tercantum dalam UU pemilu, hanyalah *lip service* (Pratiwi, 2019:273). Namun pada praktiknya masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk tidak hanya sekedar memformulasikan aspek legalnya, melainkan juga pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang lebih ramah gender dalam usaha memperbaiki dan menyiapkan sumber daya manusia terkhususkan perempuan untuk berperan aktif dalam politik. Hal yang dapat dipersiapkan untuk menjadi faktor utama memaksimalkan sistem kuota 30% ini di tengah budaya patriarki, dan gencaran politik maskulinitas, tidak hanya penerapan sistem kuota yang perlu dilakukan, tetapi juga Pendidikan yang menunjang untuk perempuan setidaknya mendapatkan pengetahuan mengenai pembekalan negaranya seperti pemberian Pendidikan politik, kajian politik di nasional maupun internasional sebagai literasi politik bagi perempuan.

Sejalan dengan itu Pendidikan Politik dalam konteks kehidupan merupakan sesuatu yang berkenaan tentang nasib suatu bangsa dan negara kedepannya. Oleh karena itu, pentingnya Pendidikan Politik agar menjadi sesuatu sasaran untuk pendewasaan dan informasi bagi warga negaranya. Menurut A. Kosasih Djahiri (1995, hlm.18) “Pendidikan politik merupakan pendidikan atau bimbingan yang mengajarkan warga negara untuk memahami dan memiliki rasa mencintai dan memiliki rasa tanggung rasa serta keterikatan (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap bangsa dan negara, dalam seluruh perangkat sistem maupun kelembagaan yang ada di negaranya”.

Oleh karena itu, keberadaan pendidikan politik ini sangat penting untuk membangun sebuah pemahaman tentang politik dan memberikan keterampilan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Kesadaran untuk mengikuti kegiatan partisipasi secara aktif, kesadaran ini tidak akan tumbuh

dengan sendirinya, ada beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh diantaranya adalah dengan memberikan sebuah pendidikan politik dan sosialisasi kepada masyarakat, serta memberikan sebuah tempat aspirasi untuk berpendapat memberikan saran, kritik dan sebuah ide – ide untuk dijadikan sebuah masukan yang membangun untuk pemerintah (Ferri, 2013:51).

Menurut Gun-gun dan Hapsah (2021, hlm. 33) dalam memberikan pemahaman tentang Pendidikan politik perlu juga melihat dari partisipasi warga negara dalam kegiatan sosialisasi politik untuk mewujudkan literasi politi di zaman era dirupsi ini. Banyaknya perubahan dalam bentuk interaksi baru yang sudah sangat inovatif dan massif. Lingkupan perubahan yang sangat luas mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan politik. Pentingnya literasi politik dalam konsolidasi dan demokrasi. Keterbatasannya tentang pemahaman isu dan kegiatan politik. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi acuh terhadap berbagai bentuk demokrasi maupun dinamika politik. Pada kenyataannya perubahan naik-turunnya partisipasi politik kerap berkaitan erat dengan rendahnya pengetahuan tentang literasi politik. Menurut Bakri dikutip oleh Khoiruddin Bashori (2018, hlm. 290) bahwa:

“Literasi politik dapat kita pahami sebagai suatu pemahaman praktis tentang sebuah konsep kehidupan sehari-hari dan bahasanya, merupakan upaya memahami tentang isu-isu politik, keyakinan para kandidat, untuk bagaimana kecenderungan mempengaruhi dirinya dan orang sekitar”.

Sejalan dengan pendapat Bakri dikemukakan oleh (Alex Crick, 1978) bahwa warga negara yang melek politik ialah:

A person who has a fair knowledge of what are the issue at contemporary politics, is equipped to have some influence, whether in school, factory, voluntary body or party, and can understand amt respect, while not sharing, the values of other, can reasonably be called ‘politically literate.’ Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang isu politik kontemporer, mereka yang disiapkan untuk memiliki sejumlah pengaruh, baik di sekolah, pabrik, badan sukarela atau partai serta dapat memahami dan menghormati dengan tidak berbagi mengenai nilai lainnya, dapat disebut melek politik.

Pada kenyataannya dalam konteks negara Indonesia masih adanya kesenjangan angka melek huruf antara perempuan dan laki-laki masih membutuhkan perhatian serius. Angka melek huruf perempuan di Indonesia sudah tinggi, namun masih lebih rendah jika

dibandingkan dengan angka melek huruf laki-laki. (Bahrul Fuad, 2021) Berdasarkan data SUSENAS BPS 2019 angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas 97,64% lebih rendah dibandingkan angka melek huruf laki-laki sebesar 98,79%. Kondisi perempuan semakin parah jika dilihat dari wilayah tinggal. Angka melek huruf perempuan yang tinggal di wilayah perdesaan 91,34% jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan angka melek huruf laki-laki di perdesaan sebesar 95,86% dalam kajian politik (Statistik, 2019).

Beberapa kategori partisipasi terlihat dari beberapa warga negara Indonesia masih dalam kategori literasi yang rendah berdasarkan survei yang dilakukan *Program for International Student Assessment (PISA)* yang di rilis *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke 62 dari 70 negara, atau merupakan 10 negara terbawah (Novrizaldi, 2021). Masih banyaknya warga negara yang terkena dengan isu *hoax* dan doktrin-doktrin radikalisme maupun pragmatis mengenai politik Indonesia. Dengan adanya pembinaan mengenai literasi politik diharapkan bisa membangun kesadaran untuk melek literasi untuk menanggapi isu-isu politik yang harus di selesaikan dengan kritis.

Indonesia pada kenyataannya berada di tingkat 107 dari 189 negara yang berada di dalam Gender Development Index (GDI) atau Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2019 (Report, 2019), yang dapat disimpulkan bahwa perempuan di Indonesia belum merasakan sebuah hak dan standar yang sama dengan laki-laki, namun dalam tahun sebelumnya sudah mendapatkan peningkatan angka.

Setelah kemerdekaan dapat diraih melalui upaya literasi politik dalam berbagai aspek, munculnya organisasi mahasiswa juga sebagian dari bentuk kesadaran dalam berpartisipasi menyalurkan pendidikan ataupun literasi politik terhadap masyarakat lainnya. Namun masih adanya *gap* gender terhadap politik yang dilakukan oleh beberapa orang. Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga politik juga mengakibatkan kepentingan perempuan kurang diakomodasi dalam sejumlah keputusan politik, karena keputusan politik yang dibuat cenderung bersifat maskulin dan kurang berefektif gender, sedangkan sebagian besar keputusan politik melibatkan perempuan juga sebagai sasarannya.

Ketimpangan gender muncul pada awal tahun 1977 di kota London, sebuah Gerakan feminisme, mulai muncul mempersoalkan kapan Perempuan dapat untuk sama

rata dengan hak laki-laki atau mampu sepadan dengan dominasi laki-laki. Kata gender memang sengaja ada dalam Gerakan untuk menggantikan budaya *Patriachat* atau *sexist*, sebagaimana dijelaskan dalam *Women's Studies Encyclopedia* sebagai konsep budaya yang berusaha menjelaskan perbedaan peran, perilaku, karakteristik mental dan emosional antara laki-laki dan perempuan yang kerap digunakan dalam masyarakat (Priandi & Roisah, 2019).

Sejak *Woman In Development* (WID) yang menjadikan perempuan hanya bagian dari pembangunan, beralih ke konsep *Woman And Development* (WAD) sebagai kritik terhadap konsep WID yang mendapatkan tekanan pada tahap itu, perubahan struktur dalam sebuah penguasaan sumberdaya produksi, pada akhirnya terbentuk sebuah konsep penyamarataan gender untuk mengatur peran yang seimbang antara perempuan dan laki-laki dengan konsep *Gender And Development* (GAD), kesetaraan Laki-laki dan perempuan dalam pembangunan menjadi kontribusi nyata terhadap penolakan untuk mengengkang ketidaksetaraan gender dalam semua kegiatan masyarakat hingga saat ini.

Keterwakilan perempuan di partai politik juga menjadi permasalahan, hal ini karena adanya UU No. 2 Tahun 2008, ketika jika dilihat kembali apa yang dimaksudkan dengan keterwakilan perempuan itu sendiri tidak dibahas dalam undang-undang, oleh karena itu, harus ditinjau dan dicari dalam perundangan lainnya. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan, bahwa perwakilan perempuan yaitu memberikan kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk berperan dalam segala bidang yaitu: bidang Eksekutif, Yudikatif, Legislatif, dan Pemilihan umum untuk tujuan keadilan dan kesetaraan gender.

Pada kenyataannya hingga saat ini *Affirmative Action* yang merupakan sebuah harapan agar perempuan mendapatkan setidaknya sesuai dengan ketentuan minimum 30 persen keikutsertaan pada setiap aktivitas publik dan politik, tampaknya belum mampu dipenuhi (Wahyudi, 2019:70). Berbagai hambatan baik dari perspektif agama, budaya, sosial, bahkan pendidikan menjadi alasan tidak terpenuhinya kuota untuk para perempuan dapat aktif menyetarakan dan menyuarakan hak nya dengan kaum laki-laki baik dalam ranah lokal, nasional, hingga internasional.

Pentingnya literasi politik pada perempuan agar angka partisipasi perempuan dalam politik meningkat serta perempuan dapat mengambil keputusan politik yang lebih

akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik menurut Femmy eka (Deputi bidang koordinasi anak) dalam Rapat koordinasi tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif.

Perlunya kesadaran besar dan kampanye serta diskusi untuk menyadarkan perempuan dalam hak dan wawasannya terhadap politik, maka KOHATI (Korps-HMIWATI) menjadi sebuah organisasi ekstra mahasiswa yang dinaungi kaum perempuan. KOHATI sebagai tempat untuk mengkader perempuan yang siap menjadi “*agent of change*” yang harus memiliki intelektualitas yang tinggi dan keterampilan yang memadai. Masyarakat yang sudah semakin modern dan kritis terhadap isu dan masalah yang semakin kompleks, namun sementara itu perempuan masih sangat minim untuk dapat menjawab tantangan zaman.

KOHATI merupakan singkatan dari Korps HMI-Wati, yang merupakan bagian dari organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang bersifat semi otonom, dengan mengandung makna “semi” terdapat garis intruksi, konsultasi dan koordinasi. Adapun “otonom” adalah KOHATI mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan bidangnya yang sesuai dengan aturan rumah tangga, dan yang membidangi baik anggota maupun kader perempuan dari HMI. Dalam penelitian ini peneliti mengkhususkan pada kepengurusan KOHATI Cabang Bandung.

Ide konkrit sejarah berdirinya KOHATI bermula pada kongres ke VIII di solo pada tanggal 17 september 1966 yang dipelopori oleh Maesyaroh Hilal, Siti Zaenab, Tejaningsih, Siti Baroroh, dan Tujumah. Pembentukan KOHATI nasional di realisir pada MUNAS I KOHATI dalam kongres ke VIII HMI. Alasan yang paling mendasar atas didirikannya KOHATI adalah *pertama*, secara internal, departemen keputrian pada saat itu sudah tidak mampu lagi menampung aspirasi kader perempuan. *Kedua*, secara eksternal HMI mengalami tantangan yang cukup pelik dikaitkan dengan hadirnya GERWANI dan adanya organisasi keperempuanan lainnya dengan variasi bentuk ideologi, isu maupun strategi Gerakan yang berbeda maka HMI membuat KOHATI untuk ikut aktif dalam Gerakan keperempuanan.

Segala bentuk kajian dan keilmuan yang diberikan oleh KOHATI ini menitikberatkan kepada kader perempuan dimana membina pribadi Muslimah untuk

mencapai *akhlakul karimah*, membina pribadi HMI-Wati yang mandiri, Memajukan kehidupan HMI-wati dalam mengamalkan dinul islam dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pedoman Dasar KOHATI. Hal ini sejalan dengan memberikan pemahaman kepada perempuan melewati literasi politik.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan juga oleh Kosasih (2011, hlm. 153) tentang “Peranan Organisasi kemahasiswaan sebagai laboratorium pendidikan politik mahasiswa”, dengan temuan sebagai berikut:

Motivasi mahasiswa dalam organisasi semakin hari semakin menurun, namun dari sisi prestasi meningkat (2) bentuk-bentuk pendidikan politik yang ditanamkan pada ormawa pada mahasiswa melalui jenjang pengkaderan di mulai dari tahap penyambutan mahasiswa baru dari tingkat universitas sampai dengan jurusan (3) media yang digunakan dalam proses sosialisasi dan pendidikan politik bagi mahasiswa yaitu dengan menggunakan media buletin, majalah, selebaran, media online seperti blog, website atau jejaring sosial, koran, majalah pamflet merupakan metode yang cukup efektif (4) peranan organisasi kemahasiswaan terhadap pendidikan politik bagi mahasiswa, ormawa sebagai bagian dari agen sosialisasi nilai-nilai politik semua responden memandang bahwa politik itu penting (5) tingkat kesadaran serta partisipasi politik mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan masih kurang dikarenakan paradigma mahasiswa yang belum menyadari akan pentingnya dunia politik dan mahasiswa saat ini masih terpengaruh oleh dunia bebas yang memudahkan semangat dalam berorganisasi.

Temuan peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa motivasi mahasiswa dalam berorganisasi semakin hari menunjukkan ke arah penurunan, padahal dalam pelaksanaannya kegiatannya merupakan sebuah sarana pendidikan politik tambahan yang di dapat mahasiswa yang bertujuan untuk memperluas wawasan ilmiah dan politik mereka dan membimbing bakat mereka.

Melalui Diskusi dan Kajian yang diadakan organisasi Ekstrakampus ini para kader mahasiswanya mendapatkan pemahaman tentang politik yang bersih sesuai dengan Undang – Undang Negara Republik Indonesia. Tidak hanya peka terhadap isu politik, organisasi Ekstra Kampus juga berperan aktif dengan kondisi Sosial masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam organisasi kemahasiswaan khususnya KOHATI, sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa perempuan sehingga dapat menjadi pelaku politik yang diharapkan dapat menciptakan sistem politik yang baik. Kader mahasiswa Perempuan pada ekstra kampus diharapkan tidak hanya untuk penambah kader saja di dalam organisasi, namun diharapkan juga memiliki Intelektual yang tinggi tanpa memandang Gender. Intelektualisasi mengenai Literasi Politik dalam organisasi kemahasiswaan

seperti ini akan berdampak bukan lagi hanya untuk anggota organisasinya saja tetapi juga mahasiswa yang lainnya walaupun tidak mengikuti Organisasi Ekstra Kampus juga. Berdasarkan permasalahan latar belakang yang sudah dijelaskan, sebelumnya peneliti bermaksud untuk mengadakan sebuah penelitian yang mengambil judul tentang: Peran Organisasi Ekstra Kampus dalam meningkatkan Literasi Politik Perempuan (Studi Deskriptif KOHATI Cabang Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, beberapa permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1.2.1.** Rendahnya kesadaran politik berkaitan dengan tinggi rendahnya pemahaman politik mahasiswa Perempuan.
- 1.2.2.** Upaya motivasi yang dilakukan mahasiswa yang berorganisasi ekstra dalam meningkatkan Literasi politik
- 1.2.3.** Proses Literasi politik dalam dunia Ekstra Kampus yaitu sebagai salah satu upaya meningkatkan kesadaran Politik mahasiswa, sebagai warga negara.
- 1.2.4.** Peran Organisasi KOHATI dalam memberikan Literasi politik kepada Mahasiswa Perempuan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latarbelakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1.** Bagaimana pandangan partisipasi perempuan dalam ranah politik di KOHATI?
- 1.3.2.** Bagaimana peran organisasi kemahasiswaan KOHATI dalam memberikan pemahaman literasi politik pada perempuan?
- 1.3.3.** Bagaimana kendala dan hambatan yang dihadapi KOHATI dalam memberikan literasi politik pada perempuan?
- 1.3.4.** Bagaimana langkah evaluasi yang dilakukan KOHATI untuk meningkatkan partisipasi dan literasi politik pada perempuan?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka disimpulkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui “Peran Organisasi Ekstra Kampus dalam meningkatkan Literasi Politik Perempuan (Studi KOHATI Cabang Bandung)”.

1.4.2. Tujuan Khusus

Sedangkan secara khususnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji:

1. Mengetahui bagaimana proses pemberian pengetahuan kepada mahasiswa perempuan mengenai pendidikan politik.
2. Mengetahui pandangan dari Kohati Cabang Bandung kepada perempuan yang aktif dalam partisipasi politik apakah sudah sesuai dengan yang semestinya.
3. Mengetahui apakah dengan adanya kader perempuan di dalam Organisasi Ekstra Kampus dapat meningkatkan literasi politik di dalam diri Keperempuanan.
4. Mengetahui hambatan dan evaluasi apa saja yang dilakukan organisasi kemahasiswaan Kohati dalam mencari inovasi untuk meningkatkan literasi politik dan partisipasi perempuan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dari beberapa segi, yaitu:

1.5.1. Dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstrakampus khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia dalam menjalankan perannya sebagai wadah Sosialisasi Literasi politik mahasiswa sehingga mampu meningkatkan sebuah kesadaran politik di kalangan mahasiswa perempuan.

1.5.2. Dari segi kebijakan

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dari segi kebijakan, yaitu kebijakan pembinaan Literasi politik dengan wadah organisasi ekstra kampus harus secara intensif.

1.5.3. Dari segi praktis

a. Bagi mahasiswa

Dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang Literasi politik sebagai salah satu wadah pengetahuan dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas diri dari mahasiswa yang sadar akan hak, tugas dan kewajibannya.

b. Bagi Himpunan Mahasiswa Islam

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagaimana pentingnya Literasi politik bagi mahasiswa perempuan dan wadah sarana untuk meningkatkan suatu kualitas organisasi sehingga dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang.

c. Bagi guru/dosen

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi dalam membina mahasiswa agar memiliki pemahaman tentang Literasi politik, serta mendorong keberanian untuk membina mahasiswa perempuan menjadi lebih percaya diri dalam menyuarakan dirinya dan masukan bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial terutama Ilmu politik sebagai cabang ilmu sosial.

d. Bagi pembina kemahasiswaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam menentukan kebijakan untuk melindungi mahasiswa perempuan dan menyangkut kegiatan mahasiswa dalam meningkatkan pembinaan organisasi yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi ini berisi rincian tentang urutan penelitian dari setiap bab dan bagian bab dalam skripsi, mulai dari bab 1 hingga bab terakhir. Dalam penelitian ini, memiliki susunan sesuai dengan Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia 2020. Berikut sistematika penelitian penelitiannya :

1. BAB I: Pendahuluan

Pada bab I dalam penelitian terdiri dari: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian skripsi.

2. BAB II: Kajian Pustaka

Pada bab II dalam penelitian ini berisikan memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pada bagian ini peneliti membandingkan, mengontraskan, dan memosisikan kedudukan masing-masing penelitian yang dikaji melalui pengaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

3. BAB III: Metode Penelitian

Pada bab III dalam penelitian ini merupakan bagian yang bersifat prosedural yakni bagian yang mengarahkan metode penelitian apa yang dipilih oleh peneliti, instrument yang seperti apa yang akan dipilih oleh peneliti, teknik pengumpulan data yang di ambil oleh peneliti hingga langkah-langkah analisis data yang dijalankan.

4. BAB IV: Temuan dan Pembahasan

Pada bab IV dalam penelitian ini terdapat dua hal utama yang disampaikan yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

5. BAB V: Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Pada Bab V dalam penelitian ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Ada dua alternatif cara penelitian simpulan, yakni dengan cara butir demi butir atau dengan cara uraian padat.

6. Daftar Pustaka

7. Lampiran